

**PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA DUSUN DALAM
PEMERINTAHAN GAMPONG
(Studi Kasus : Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kab. Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ARIFA MAKFIRAH

NIM. 180801016

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifa Makfirah
NIM : 180801016
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Perempuan Sebagai Kepala Dusun Dalam Pemerintahan Gampong (Studi Kasus: Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kab. Pidie)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Arifa Makfirah

**PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA DUSUN DALAM
PEMERINTAHAN GAMPONG**

(Studi Kasus: Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kab. Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

ARIFA MAKFIRAH

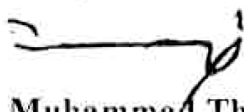
NIM . 180801016

Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

UIN
جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y


Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Muhammad Thalal, Lc., M.S, M.Ed
NIP.197810162000032004

Pembimbing II



Melly Masni, M. I. R
NIP.199305242020122016

**PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA DUSUN DALAM
PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Kasus: Desa Dayah Baro
Kecamatan Delima Kab.Pidie)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal :


Sabtu, 17 Desember 2022
23 Jumadil Awal 1444

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Muhammad Thalal, Lc., M.S, M.Ed
NIP. 197810162000032004

Sekretaris,


Melly Masri, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Penguji I,



Rizkika Lhena Darwin, M.A.
NIP.198812072018032001

Penguji II,


Renaldi Safriansyah, M.H.Sc., M.P.M
NIDN.2007017903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh,




Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Gampong dan dampak kepemimpinan perempuan sebagai kepala dusun dalam pemerintahan Gampong serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi performa perempuan dalam pemerintahan Gampong di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif supaya diperoleh data secara alami (natural) dan menyeluruh sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintahan adalah pendidikan, kebebasan ekonomi, faktor sosial dan patriarki. Kemudian dampak dari kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan menghasilkan agenda yang berbeda, gaya kepemimpinan yang berbeda, peningkatan jumlah partisipasi perempuan serta meningkatkan partisipasi terhadap perempuan lainnya. Faktor-faktor yang mendukung kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan diantaranya adalah pendidikan dan dukungan dari keluarga, akan tetapi selain itu perempuan juga harus dihadapkan dengan faktor penghambat performanya di pemerintahan yaitu agama dan pembagian waktu antara kegiatan dalam pemerintahan dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga.

Kata Kunci : *Peran, Perempuan, Kepala Dusun, Pemerintahan, dan Gampong*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan atas keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul “PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA DUSUN DALAM PEMERINTAHAN GAMPONG(Studi Kasus: Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kab. Pidie)”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang Tua tercinta yaitu Bapak Marzuki Z.A dan Ibu Nuraini serta Kakak dan Adik yaitu Indah Manzila, Balqis Natasyara dan Zaratus Syita serta keluarga besar lainnya yang telah mendo'akan, menyemangati, baik dari segi materil maupun non materil.
2. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
3. Dr. Muji Mulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Muhammad Thalal, Lc., M.S, M.Ed selaku pembimbing I dan Melly Masni M. I. R. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

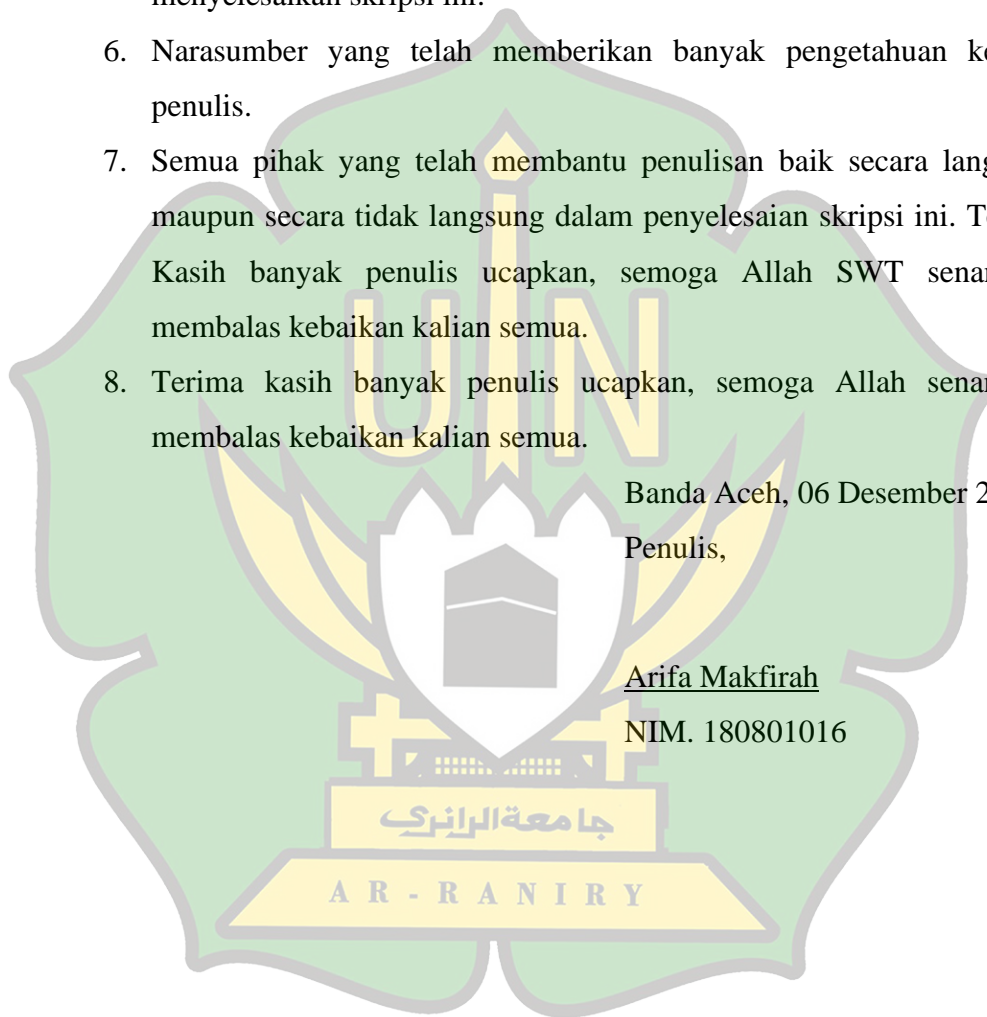
5. Kepada orang terdekat Pocut Haura Zakiyah, Sarah Amalia, Nelul Herni Hijjria, Sri Multi Mailisa, Maula Masthura, Ulfa Yofita. Dan teman-teman seperjuangan lainnya yaitu Baim Almubaraq, Khalid Fuad, Haris Munandar. Serta teman-teman angkatan 2018 Program Studi Ilmu Politik. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.
8. Terima kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 06 Desember 2022

Penulis,

Arifa Makfirah

NIM. 180801016



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan	9
2.2 Teori Kepemimpinan.....	12
2.3 Kepala Dusun	18
2.4 Kesetaraan Gender	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Lokasi Penelitian	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	26
3.5 Informan Penelitian	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data	28
BAB IV PEMBAHASAN	31
4.1 Profil Gampong Dayah Baro	31
4.2 Perempuan dalam pemerintahan desa Dayah Baro	37
4.2.1 Pendidikan	37
4.2.2 Kebebasan Ekonomi.....	41
4.2.4 Patriarki	43
4.3 Faktor Pendukung Kepemimpinan Perempuan di Desa Dayah Baro	46
4.4 Faktor Penghambat (Tantangan) Kepemimpinan Perempuan di Desa Dayah Baro.....	48
4.6 Dampak Kepemimpinan Perempuan di Desa Dayah Baro	52
4.6.1 Agenda yang Berbeda	53
4.6.2 Gaya Kepemimpinan yang Berbeda.....	54
4.6.3 Peningkatan Jumlah Partisipasi Perempuan.....	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1. Kesimpulan.....	58
5.2. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan masih menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, termasuk pula di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie, Aceh. Di antara narasi yang sering diperdebatkan yaitu mengenai sejauh apa perempuan dapat berperan dan memiliki eksistensi di dalam pemerintahan, bagaimana memicu minat partisipasinya, dan lain sebagainya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam bidang pemerintahan, namun pada kenyataannya stigma masyarakat masih terus saja berkuat pada keyakinan bahwa ruang lingkup pemerintahan hanyalah untuk laki-laki. Padahal telah ada beberapa desa/gampong yang sudah melibatkan perempuan didalam jajaran pemerintahannya dan telah membuktikan perempuan juga dapat memiliki peran penting didalam pemerintahan gampong serta dapat bekerja beriringan dengan kaum laki-laki.

Sistem sosial budaya di Aceh yang cenderung kepada sistem patriarki menjadi penyebab mengapa stigma tersebut terus bertahan. Tsani menjelaskan bahwa sistem budaya Patriarki di Aceh yang mendominasi memperlihatkan bahwa adat dan budaya menjadi panduan bagi masyarakat untuk berperilaku sehari-hari yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan mendarah daging (*internalized*) sehingga menimbulkan pola pikir yang

disebut *mindset* dan selanjutnya menimbulkan *stereotype* (pelabelan)¹. Pemikiran (*mindset*) bahwa pemerintahan merupakan kawasan bagi kaum laki-laki semata telah menyebabkan pembatasan terhadap aktivitas-aktivitas perempuan yang pada akhirnya mempengaruhi keterlibatannya dalam peran pengambilan keputusan di ruang publik. Hal ini dikonfirmasi pula dalam penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari yang menemukan bahwa sistem sosial dan budaya patriarki yang terus berkembang dalam pemikiran masyarakat Aceh menjadi salah satu faktor penyebab minimnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di mana dalam sistem patriarki, terdapat ketimpangan peran antar kaum laki-laki dan perempuan.²

Di Indonesia sendiri, stigma tersebut berusaha dibendung melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi fakta dilapangan masih menunjukkan bahwa bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan masih banyak terjadi diberbagai daerah termasuk dalam ruang lingkup politik dan pemerintahan.³ Salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam pemerintahan yaitu perempuan sering dianggap kurang kompeten dalam keikutsertaan politik. Hal ini dipandang pula sebagai upaya marginalisasi perempuan, dimana mereka selalu diidentikkan dengan mengurus rumah tangga saja, padahal perempuan juga bisa ikut andil dalam dunia politik.⁴

¹Rabiul Tsani, 2021, *Peran Tuha Peut Gampong Perempuan dalam Qanun Kota Langsa (Studi Kasus Gampong Blang Kec. Kota Langsa)*, Jurnal of Gender h.64

²Novita Sari, 2020, *Affirmative Action di Aceh: Kendala dan Upaya Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Jurnal Pendidikan h.49

³Undang-Undang Pasal 27 dan 28 Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan

⁴Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2018, *Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Volume 2, h.4

Padahal melalui undang-undang tersebut, pemerintah ingin membuka peluang bagi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan karena meyakini akan arti penting peran perempuan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dikarenakan telah banyak contoh keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di berbagai negara yang menunjukkan dampak yang positif bagi kemajuan negaranya. Sebut saja Indira Gandhi yang merupakan salah satu sosok perempuan yang menjadi perdana menteri wanita pertama di India. Indira diberi kepercayaan untuk memimpin pemerintahan di India pada tahun 1966 dan terus terpilih selama tiga periode berturut-turut. Pencapaian terbesar Indira antara lain yaitu memerdekakan Pakistan Timur yang kini disebut sebagai Negara Bangladesh, kemudian berangkat dari hal tersebut Indira juga memimpin India dengan merevitalisasi industri pertanian serta menasionalisasikan bank. Kemudian di benua Eropa tepatnya di Inggris ada Margaret Thatcher yang menjadi perdana menteri pertama wanita Inggris pada tahun 1979. Margaret berangkat sebagai pemimpin partai konservatif dan menjadi wanita pertama yang menjadi pemimpin di dunia Barat yang dijuluki "Nyonya Besi". Di Indonesia ada Megawati Soekarno Putri yang mulai ikut serta dalam politik sebagai pemimpin partai PDIP dan sempat menjadi wakil presiden ke-8 bersama dengan Gus Dur, dan kemudian menjabat sebagai presiden yang membuat Megawati menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa kaum perempuan juga dapat menjadi mitra kerja yang baik bagi kaum laki-laki dalam pengambilan keputusan.

Meskipun pada dasarnya perempuan telah memiliki kekuasaan politik yaitu hak suara, tetapi pada kenyataannya mereka belum memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaannya. Contohnya keikutsertaan perempuan dalam politik hanya sekedar memberikan hak suara, tetapi masih sangat minim perempuan yang tergabung dalam pemerintahan.⁵Oleh karena itu, melalui Keppres nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender sosial, pemerintah ingin memberi pengakuan akan esensi peran serta perempuan, yaitu bahwasanya perempuan juga mampu bertindak sebagai subjek yang dapat berperan dalam mengontrol dan mengelola sumber daya.⁶Di samping itu, makna penting lainnya dari keterlibatan perempuan adalah bahwa ia menjadi salah satu indikator yang dapat mengukur kemajuan pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam suatu daerah. Karena dengan demikian, perempuan mampu menyuarakan aspirasi masyarakat, terkhususnya tentang isu-isu perempuan serta perempuan bisa berperan ganda dalam mengatur pemerintahan dan rumah tangga.

Selanjutnya, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang(UU)No.68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yaitu mengatur mengenai Perwujudan dan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik⁷. Dari UU tersebut dapat kita lihat bahwasanya Indonesia memberikan kesempatan bagi perempuan untuk ikut

⁵KEMENKO PMK, 2019, *Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan*, Artikel Perempuan dan Anak

⁶Keppres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Gender

⁷Undang Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Perempuan

berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa ada diskriminasi terhadap mereka, jadi tidak ada aturan khusus yang membatasi perempuan untuk terlibat dan menduduki jabatan dalam pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di desa. Dalam konteks pemerintahan desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Gampong⁸. Maka Kepala Desa menetapkan keputusan untuk mengangkat Kepala Dusun yang disebut Ule Jurong Gampong. Kepala Dusun atau disebut Ule Jurong merupakan salah satu jabatan yang terdapat dalam struktur pemerintahan Gampong, Kepala Dusun merupakan perangkat desa yang berkedudukan untuk mengatur wilayahnya dalam desa tersebut. Kepala Dusun berperan membantu kepala desa dalam pengadaan barang dan jasa serta membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong yang termasuk kedalamnya data penduduk, pembinaan masyarakat gampong, serta pemberdayaan masyarakat gampong. Desa Dayah Baro merupakan salah satu Gampong yang terletak di wilayah Aceh tepatnya di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Di desa ini terdapat struktur pemerintahan yang lengkap dengan melibatkan perempuan sebagai Kepala Dusun atau Ule Jurong, perempuan yang menjabat sebagai Kepala Dusun merupakan penduduk asli dari desa tersebut. Menurut data struktur pemerintahan yang terdapat di gampong Dayah Baro, dari keseluruhan 13 jabatan pemerintah desa, 8 jabatan diwakili oleh laki-laki dan 5 jabatan oleh perempuan atau jika dipresentase setara dengan 38%. Lima diantara jabatan yang diwakili perempuan yaitu empat orang sebagai kadus dan satu orang sebagai kaur keuangan. Dibandingkan dengan

⁸Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Gampong lainnya di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie yaitu diantaranya Gampong Ulee Tutue Raya Aree, menurut data Gampong tersebut dari keseluruhan 13 jabatan hanya kaur keuangan yang diwakili oleh perempuan dan selebihnya dijabat oleh laki-laki. Kemudian ada Gampong Keurumbok, sama halnya dengan Gampong Ulee Tutue Raya bahwa menurut data struktur pemerintahan Gampong Keurumbok tercatat hanya kaur keuangan yang dijabat oleh perempuan sedangkan jabatan lainnya dipegang oleh laki-laki. Di Kecamatan Delima terdapat juga Gampong Puuk Aree, dimana keterwakilan perempuan dalam pemerintahan yaitu ada dua orang yang terdaftar sebagai kaur keuangan dan Kaur umum, selebihnya masih didominasi oleh laki-laki. Untuk jabatan Kepala Dusun di keempat Gampong yang ada di Kecamatan delima, hanya Desa Dayah Baro yang jabatan Kepala dusun diwakili oleh perempuan, sedangkan ketiga Gampong lainnya diwakili oleh laki-laki. Jadi dapat disimpulkan bahwa kaur keuangan adalah posisi atau jabatan yang biasanya paling maksimal dijalankan tugasnya oleh perempuan dalam keterlibatannya pada pemerintahan Gampong.

Dari uraian diatas maka penulis ingin melihat bagaimana peran perempuan dalam struktur pemerintahan Gampong di tengah-tengah stigma masyarakat yang masih mempercayai bahwa ranah pemerintahan merupakan area bagi kaum laki-laki. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA DUSUN DALAM PEMERINTAHAN GAMPONG(Studi Kasus:Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kab. Pidie).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintahan di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie?
2. Bagaimanakah dampak kepemimpinan perempuan sebagai kepala dusun di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie?
3. Apa saja tantangan yang menghambat performa perempuan dalam pemerintahan gampong di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hal yang mendorong keterlibatan perempuan sebagai Kepala Dusun dalam pemerintahan di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui dampak kepemimpinan perempuan sebagai kepala dusun di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie
3. Untuk mengetahui tantangan yang mempengaruhi performa perempuan dalam pemerintahan di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keilmuan di bidang politik, terkhususnya terkait dengan keterlibatan perempuan dalam Pemerintahan Gampong
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap keterlibatan perempuan sebagai Kepala Dusun dalam Pemerintahan Gampong
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan pengembangan pengetahuan lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk kasus-kasus terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembahasan Penelitian Yang Relevan

Pertama, skripsi dari Yuli Susanti mahasiswa Universitas Teuku Umar yang berjudul *“Analisis Ketidakterlibatan Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”* pada tahun 2013. Penelitian ini berfokus pada permasalahan terkait faktor yang mempengaruhi ataupun kendala yang menyebabkan perempuan tidak terlibat dalam struktur pemerintahan Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur pemerintahan di Gampong Gunong Kleng tidak terdapatnya perempuan dalam jajaran pemerintahan Gampong, semua aparatur desa dikuasai oleh laki-laki sebagai pengambil keputusan dan pemegang kekuasaan di Gampong Gunong Kleng maka pada dasarnya Gampong tersebut jelas tidak memiliki keterlibatan sama sekali dengan perempuan dalam struktur pemerintahan Gampong dimana para pelaku utama yang duduk di pemerintahan adalah laki-laki. Kemudian faktor yang menjadi kendala perempuan dalam berpartisipasi adalah dikarenakan minimnya pendidikan yang layak bagi perempuan di Gampong Gunong Kleng dimana hanya sedikit yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sebagian besar hanya tamatan SMA dan SMP. Akibatnya timbul lah stigma masyarakat yang beranggapan bahwanya laki-laki yang bisa berada dalam pemerintahan dan politik Gampong, hal ini juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang gender dan bagaimana pengimplementasiannya

dimana tidak boleh ada diskriminasi gender dalam tatanan kehidupan bermasyarakat pada zaman sekarang ini. Karena pada dasarnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan bukanlah perbedaan biologis atau kodratnya masing- masing melainkan hal yang membedakannya yaitu kedudukan dan fungsi serta peran masing-masing individu baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Kedua, Jurnal oleh Munawiah dan Kamaliah Dosen Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan guru Sosiologi MAN Trieng Gadeng Kabupaten Pidie Jaya yang berjudul “*Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu*” pada tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan sebagai tuha peut gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Meureudu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa keberadaan perempuan dalam anggota Tuha Peut Gampong tidak hanya sebagai saran dan pertimbangan kepada kepala desa melainkan juga sebagai pengawasan pada reusam gampong, pengelolaan keuangan, dan juga sebagai meditor sekaligus negosiator dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian permasalahan yang terjadi di gampong. Proses keterlibatan perempuan dalam pemerintahan gampong di Kecamatan Mereudu juga tidak terlepas Qanun gampong, anggota tuha peut dipilih berdasarkan keaktifan dalam setiap aktivitas di gampong seperti kegiatan adat istiadat dan kematian. Adapun beberapa di rekomendasikan oleh kepala desa setempat guna terjadinya pemerataan dalam

⁹Yuli Susanti, 2013, *Analisis Ketidakterlibatan Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*, Skripsi h.10-13

pembangunan dan pembinaan masyarakat gampong. Pada dasarnya tuha peut merupakan lembaga gampong yang bertugas mengambil kebijakan berdasarkan hasil musyawarah, keterlibatan perempuan didalamnya membuat ruang bagi perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dalam pengambilan kebijakan bagi gampong.¹⁰

Ketiga, jurnal oleh Cut Laely dkk mahasiswa Universitas Malikussaleh yang berjudul “*Peran Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong (Studi Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)*” pada tahun 2020. Penelitian ini berfokus pada penyebab tidak optimalnya peran perempuan dalam pemerintahan gampong melalui wawancara langsung dengan pihak terkait. Hasil dari penelitian ini adalah masih adanya keterbatasan ruang gerak bagi perempuan untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan gampong dan ketidakpercayaannya pada perempuan sehingga perempuan hanya ikut dilibatkan dalam kegiatan sehari-hari.¹¹

Keempat, skripsi oleh Mahmudi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berjudul “*Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa*” pada tahun 2011. Penelitian ini berfokus pada melihat kinerja yang telah diperlihatkan oleh kepala desa yang menjabat yaitu seorang perempuan dan sejauh mana peran perempuan dapat meningkatkan pembangunan desa yang berkeadilan ke arah yang lebih baik. Hasil dari penelitian ini adalah peran ganda dari perempuan

¹⁰Munawiah dan Kamaliah, 2017, *Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu*, Jurnal Pendidikan h.7-9

¹¹Cut Laely dkk, 2020, *Peran Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong (Studi Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Sosiologi.

memberikan dampak positif bagi warga dan kemajuan desa, dimana selama menjabat sebagai kepala desa banyak infrastruktur yang telah dibangun dan direhab dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Tetapi ada beberapa faktor yang menghambat perempuan dalam melaksanakan perannya di pembangunan desa antara lain yaitu mindset masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan yang dianggap masih bisa diragukan pengalaman dan pendidikannya.¹²

2.2 Teori Kepemimpinan

Dalam Islam maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT. Selain itu juga untuk menjadi khalifah di bumi, kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan di dalam Q.S. Al-An'am ayat 165 yaitu "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu, sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang". Dan Q.S. Al-Baqarah ayat 30 yang artinya "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". Dari

¹²Mahmudi, 2011, *Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa*, Skripsi h.72

ayat tersebut terlihat jelas bahwasanya Allah telah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin tanpa membatasi baik itu perempuan maupun laki-laki. Kepemimpinan adalah serangkaian kegiatan menata berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan antara satu sama lain. Sebagai pemimpin, dalam mempengaruhi orang lain dapat dilakukan dengan cara seperti memberikan imbalan, menjanjikan masa depan yang lebih baik, memberi tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dalam hal kepemimpinan, Indonesia telah memberikan kebebasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk bisa terlibat dan memimpin dalam pemerintahan. Keterlibatan perempuan merupakan sesuatu yang menjadi bagian mengenai apa yang dilakukan seseorang perempuan di struktur pemerintahan dan sosial masyarakat. Peran seorang perempuan dikembangkan melalui norma-norma yang ada dalam masyarakat yang pada hakikatnya perempuan berperan melindungi dan mengurus keluarga.

Dibidang legislatif juga dijelaskan harus adanya partisipasi perempuan paling sedikit 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sehingga para legislator perempuan dapat memperjuangkan hak-hak perempuan dimana tidak akan timbul kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam legislatif.¹³Pemberlakuan peraturan tersebut dikarenakan beberapa alasan di antaranya agar terpenuhinya tanggung jawab terhadap isu kebijakan publik seperti penyampaian aspirasi perempuan dan isu-isu anak serta lingkungan sosial lainnya. Pada dasarnya perempuan memang sudah ikut

¹³Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, (Jakarta:Sinar Grafika,2004)

berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat seperti kegiatan posyandu, organisasi pemberdayaan perempuan, komite sekolah serta pengajian maka hal tersebut dapat dijadikan batu loncatan atau pun modal dasar untuk ikut terlibat dalam pemerintahan. Dengan adanya undang-undang diatas merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kaum perempuan yang harus digunakan sebaik mungkin.

Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Rajesh Paul dkk pada tahun 2019, yang meneliti tentang partisipasi perempuan dalam perspektif Negara Bangladesh dijelaskanada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan, yaitu :

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan, bagi perempuan pendidikan dapat membantu untuk mendapat hak-hak sosial dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan keluarga. Dengan adanya pendidikan maka perempuan bisa menggunakan haknya dalam politik.

2. Kebebasan ekonomi

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi terbilang cukup rendah, meskipun perempuan terlibat dengan kegiatan rumah tangga tetapi masyarakat kita tidak menganggapnya sebagai pekerjaan ekonomi. Sangat sulit bagi perempuan untuk terlibat dalam pekerjaan yang alasannya demi menjaga adat agama dan norma sosial. Hal ini berkaitan dengan situasi finansial perempuan, dimana perempuan dianggap tidak mampu dalam segi ekonomi dikarenakan masyarakat berpendapat bahwasanya laki-laki

memiliki taraf yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi dibandingkan perempuan, sedangkan pada dasarnya partisipasi politik sangat berkaitan dengan ekonomi.

3. Nilai-Nilai Agama. Agama juga menjadi tolak ukur yang penting dalam partisipasi perempuan, oleh karena itu agama adalah salah satu alasan minimnya partisipasi perempuan dalam politik.

4. Norma-Norma Sosial

Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada mengganggu partisipasi efektif perempuan dalam badan-badan pemerintah daerah, karena pada dasarnya norma budaya dan sosial mengatur bahwa perempuan harus mengurus rumah tangga dan bukan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

5. Patriarki

Dengan adanya sistem patriarki perempuan memiliki kedudukan dibawah laki-laki, sehingga hal tersebut membuat laki-laki cenderung lebih mendominasi daripada perempuan. Akibatnya perempuan hanya memiliki sedikit peluang atau dapat dikatakan minimnya kesempatan perempuan untuk bergabung dalam politik dikarenakan adanya penerapan sistem patriarki tersebut. Hal tersebut terjadi karena sistem patriarki memusatkan serta mengutamakan kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dan dianggap dapat mengendalikan perempuan karena adanya posisi lebih tinggi tersebut, sehingga perempuan kurang diperhatikan dalam bidang politik. Patriarki terus berkembang seiring perkembangan zaman dan

masih melekat dalam kehidupan masyarakat dari zaman dulu sampai dengan sekarang, selama sistem budaya patriarki masih terus berada dalam kehidupan masyarakat maka perempuan akan semakin sulit ikut serta dalam kegiatan publik dan juga politik. Budaya patriarki membuat perempuan sukar dalam bersosialisasi dengan masyarakat yang mengakibatkan perempuan tidak terlalu fasih dalam berkomunikasi politik sehingga perempuan sulit mendapatkan basis suara di masyarakat.¹⁴¹⁵

Menurut riset oleh UNESCAP terhadap 13 negara dalam studi komparatif yang berjudul “Woman in Local Government in Asia and Local Pasific” dikatakan bahwa dengan adanya partisipasi perempuan dalam pemerintahan berarti masa depan yang lebih baik bagi perempuan lain dan anak-anak mereka serta untuk generasi mendatang, serta dampak dari kepemimpinan perempuan yaitu sebagai berikut :

1. Agenda kepemimpinan yang berbeda

Perempuan juga memiliki perbedaan dimana perempuan berfokus kuat pada isu-isu perempuan dan hak asasi manusia yang memiliki tujuan untuk pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan dalam politik lokal akan menyebabkan perubahan dalam masyarakat,

¹⁴Irsyad Jomisra, 2022, *Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Terkait Budaya Patriarki Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LimaPuluh Kota Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal, h.8

¹⁵Rajesh Paul, Bobita Mohajan, Mohammed Mahin Uddin, MD Amjad Hossain Reyad, 2019, *Factors Affecting Women Participation in Local Government Institution: A Case Study of Bangladesh Perspective*), Journal of Global Research in Education and Social Science, h. 99-100

diskriminasi akan lebih sedikit terhadap perempuan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pekerjaan serta pengasuhan anak. Perempuan dalam kepentingannya juga terfokus pada isu-isu lingkungan, pengasuhan anak, pendidikan dan pengasuhan.

2. Gaya kepemimpinan perempuan

Gaya memimpin oleh perempuan terbilang berbeda dari laki-laki yaitu lebih inklusif, kolaboratif, dan konsultatif, dimana dalam pengambilan keputusan perempuan cenderung lebih demokratis dengan melakukan diskusi serta perdebatan sehat daripada memerintah. Cukup terbuka terhadap pendapat-pendapat serta lebih memilih solusi menang-menang (*win-win*) dan memberikan fasilitasi bagi perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

3. Peningkatan jumlah partisipasi perempuan

Peningkatan jumlah partisipasi perempuan di pemerintah daerah berdampak positif pada peningkatan posisi perempuan di kalangan masyarakat karena menciptakan peningkatan pemahaman tentang kondisi perempuan dan anak-anak yang mengarah pada kebijakan, apabila perempuan mencapai posisi titik pengambilan keputusan di pemerintah daerah, maka perhatian lebih akan ditunjukkan untuk perbaikan kondisi hidup dan kerja perempuan yang dapat menguntungkan kegiatan perempuan termasuk alokasi dana dan anggaran.

4. Dampak terhadap komunitas

Perempuan memberikan dampak terhadap komunitas yang memiliki pengaruh signifikan pada inisiatif berbasis lebih luas melalui pekerjaan mereka dengan komunitas dan memprakarsai secara aktif serta mendukung layanan publik.

5. Dukungan terhadap perempuan

Sebagai dukungan terhadap perempuan lain, perempuan percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan partisipasi perempuan dan meningkatkan status perempuan secara umum. Banyak yang bekerja secara aktif untuk meningkatkan jumlah perempuan di tingkat pemerintahan ini dan untuk memastikan bahwa isu-isu perempuan tetap menjadi agenda utama untuk direalisasikan. Ikut terlibat dalam merekrut lebih banyak perempuan dan meningkatkan jumlah perempuan dalam peran konsultatif di berbagai komite dan program.¹⁶

2.3 Kepala Dusun

Kepala Dusun atau disebut Ule Jurong merupakan salah satu jabatan yang terdapat dalam struktur pemerintahan Gampong, Kepala Dusun merupakan perangkat desa yang berkedudukan untuk mengatur wilayahnya dalam desa tersebut. Kepala Dusun berperan membantu kepala desa dalam pengadaan barang dan jasa serta membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Gampong yang termasuk kedalamnya data penduduk, pembinaan masyarakat gampong,

¹⁶UNESCAP, *Women in Local Government in Asia and the Pasific (A Comparative Analysis of Thirteen Countries)*, Jurnal h. 44-52

serta pemberdayaan masyarakat gampong. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya membantu Kepala Desa, Kepala Dusun juga harus terlebih dahulu diangkat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Menurut Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tupoksi kepala lorong/kepala dusun dalam pemerintahan gampong adalah sbb :

1. Membina masyarakat agar hidup rukun dan senantiasa tentram dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
2. Menjalankan upaya perlindungan bagi masyarakat
3. Sebagai mobilisasi kependudukan
4. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri
5. Melakukan pengelolaan potensi serta penataan wilayahnya
6. Membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
7. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.
8. Membantu jalannya roda pemerintahan gampong ke arah yang lebih baik
9. Memberi saran pertimbangan kepada kepala desa mengenai kebijakan yang akan diambil
10. Kepala Desa dalam melaksanakan wewenangnyanya.
11. Melapor pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh kepala desa¹⁷

¹⁷Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dusun mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menerima Siltap (Penghasilan Tetap) setiap bulan, tunjangan, dan mendapat jaminan kesehatan, serta penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa
2. Menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya
3. Dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Kesetaraan Gender

Gender adalah perbedaan yang diberikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan terkait ciri, fungsi, peran dan tanggung jawab yang sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat. Gender merupakan jenis kelamin sosial atau sebutan untuk jenis kelamin berdasarkan peran sosial, istilah gender berpusat pada perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sosial budaya yang berhubungan dengan sifat, peran dalam masyarakat, posisi, serta status. Selain itu gender juga diartikan sebagai pengelompokan manusia yang utama, setiap masyarakat menciptakan rintangan dalam hal ketidaksetaraan akses ke kekuasaan, kepemilikan dan prestise atas dasar jenis kelamin. Para sosiolog mengelompokkan perempuan dalam minority group (kelompok minoritas), jika dilihat dari sisi kuantitas antara perempuan dan laki-laki maka hal ini sangatlah berbanding terbalik, dikarenakan jumlah perempuan yang justru lebih banyak dari laki-laki malah digolongkan kelompok minoritas.¹⁸ Berbicara tentang kesetaraan

¹⁸James M Henslin, 2006, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama), h.4

gender maka erat kaitannya dengan keadilan gender. Keadilan gender adalah pemberlakuan sikap yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, apabila tidak adanya diskriminasi publik terhadap kaum lelaki dan perempuan maka keadilan gender telah terwujud sebagaimana mestinya. Dengan begitu setiap orang akan memiliki akses dan kesempatan yang sama atau setara dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesetaraan gender menciptakan kesamaan kondisi antara status laki-laki dan perempuan untuk dapat memperoleh kesempatan dan merasakan haknya sebagai manusia sehingga bisa berperan aktif dalam pembangunan. Selain hal tersebut di atas perlu juga dipahami bahwa dalam kesetaraan gender ada perbedaan antara gender dan seks dimana gender merupakan dimensi sosial budaya seorang laki-laki dan perempuan sedangkan seks adalah dimensi biologisnya. Isu kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan telah diformalkan di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Pasal 15, yang berbunyi “Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Sebagai negara republik, perlu ditumbuhkan budaya demokratis dalam segala aspek akan menjamin keharmonisan diantara sesama. Dengan begitu pikiran dan perbuatan yang patriarkis dapat perlahan dihilangkan.¹⁹

Cara untuk mencapainya kesetaraan gender serta memberdayakan kaum perempuan antara lain adalah sebagai berikut :

¹⁹Gita Rama Mahardika, <https://www.its.ac.id/news/2020/04/22/belenggu-budaya-patriarki-terhadap-kesetaraan-gender-di-indonesia/>, diakses 28 September 2022

- Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun tempatnya
- Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan diruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai eksploitasi lainnya
- Menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan paksa dan perkawinan pada usia anak dibawah umur
- Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial,serta meningkatkan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional
- Menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam ranah politik, ekonomi, dan masyarakat
- Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai Progame of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform. Serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi tersebut

Ada dua jenis pandangan dalam kesetaraan gender tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan menurut Husein Muhammad dalam bukunya yang berjudul Fiqh Perempuan yaitu sbb:

1. Posisi kaum laki-laki berada di atas kaum perempuan. Perempuan adalah makhluk kelas dua setelah laki-laki yang diciptakan Tuhan, sebab penciptaan perempuan pertama (Hawa) berawal dari tulang rusuk laki-laki (Adam) sehingga pada aliran ini perempuan merupakan subordinat. Perempuan berada pada posisi inferior dan laki-laki superior. Posisi ini diyakini oleh beberapa kalangan sebagai fitrah, kodrat, hakikat, dan hukum Tuhan yang berlaku yang tidak dapat diubah. Perubahan terhadap hal tersebut sama halnya dengan menyalahi hukum-hukum Allah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis yang berlaku sepanjang masa untuk segala tempat. Atas dasar ini hak dan kewajiban perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, baik dalam hukum-hukum ibadah, hukum-hukum keluarga maupun hukum-hukum publik. Dapat dikatakan dalam pemahaman aliran ini hak perempuan adalah sebagian hak laki-laki. Kelompok ini menentang keras persamaan kedudukan (kesetaraan gender) antara laki-laki dan perempuan.
2. Posisi laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kesempatan yang dimiliki oleh kaum laki-laki, sebab antara keduanya terdapat potensi kemanusiaan yang sama baik dalam hal intelektual, fisik maupun mental-spiritualnya. Perbedaan dari sisi biologis tidaklah menjadi penghalang yang membatasi

gerak seorang perempuan untuk mengekspresikan hak dan kewajibannya di mata hukum dan sosial. Berdasarkan hal ini, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam menjalankan kehidupan mereka baik dalam ranah pribadi maupun publik.²⁰

Membahas tentang peran perempuan dalam pemerintahan menurut Islam berarti berbicara tentang peran wanita sebagai bagian dari masyarakat. Islam melihat bahwasanya perempuan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban yang sama dengan laki-laki untuk mewujudkan kesadaran politik pada diri wanita sendiri maupun masyarakat secara umum. Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa. Keduanya bertanggung jawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat baik laki-laki maupun wanita, karena masalah ini dipandang sebagai satu masalah yaitu masalah manusia. Jadi, tidak ada aturan hukum dalam islam yang menyatakan bahwa perempuan dilarang berkecimpung dalam ranah publik khususnya pemerintahan

²⁰Husein Muhammad, 2015, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Diva Press), h.56

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak diperkenankan memisahkan suatu individu atau kelompok ke dalam suatu variabel maupun suatu hipotesis, tetapi perlu dipandang sebagai suatu keutuhan. Berdasarkan deskripsi di atas penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif supaya diperoleh data secara alamiah (natural) dan menyeluruh sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan dan bukan merupakan hasil manipulasi maupun rekayasa karena tidak ada variabel atau unsur yang mengontrol²¹

3.2 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah “Peran Perempuan sebagai Kepala Dusun dalam Pemerintahan Gampong (Studi Kasus: Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kab. Pidie)

²¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h.82

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Penelitian lapangan ini akan dilakukan pada Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie untuk melihat bagaimana peran perempuan sebagai kepala dusun dalam pemerintahan gampong.

Sumber data merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta yang disajikan dalam bentuk bahan untuk menyusun informasi. Data adalah segala informasi yang diolah untuk kegiatan penelitian sehingga dapat disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan.²² Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya atau aslinya.²³ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan Informan ialah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh

²²Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta,Sukses Offset,2010), 175

²³ Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 39

pewawancara. Orang-orang yang berhubungan dengan penelitian, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, data sekunder dapat diperoleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, buku-buku, majalah ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, koran, makalah, artikel dari internet, dan lain-lain.²⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa data primer dan data sekunder diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data sekunder juga diharapkan dapat mempertegas teori dari kesenjangan praktek yang peneliti lakukan.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dianggap menguasai dan memahami berbagai data, informasi, maupun peristiwa yang terjadi dari subjek objek penelitian. Adapun informan penelitian saya terdiri dari Kepala Dusun atau Ule Jurong Baroh, Ule Jurong Puntong, Ule Jurong Teungoh, dan Ule Jurong Tunong. Kemudian masyarakat Desa Dayah Baro dari perwakilan ibu-ibu, pemuda, orang yang bekerja di pemerintahan, dan yang tidak bekerja dipemerintaha

²⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, 39.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan keempat Kepala Dusun di Desa Dayah Baro. Metode yang digunakan adalah interview atau wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan, wawancara dilakukan dengan 9 informan dan diberi kebebasan dalam memberikan jawaban. Berikut 9 informan yang diwawancarai oleh penulis :

- a. Kepala Desa. Penulis mewawancarai informan ini untuk mengetahui pertimbangannya dalam memilih kepala dusun perempuan.
- b. Kepala dusun Tunong, kepala dusun Teungoh, kepala dusun Puntong, dan kepala dusun Baroh. Penulis mewawancarai informan ini untuk mengetahui faktor yang mendorong keterlibatan perempuan, dampak dari kepemimpinan perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat performa perempuan di pemerintahan Gampong.
- c. Perwakilan masyarakat yaitu ibu-ibu, yang tidak bekerja dipemerintahan, yang bekerja di pemerintahan, dan pemuda. Penulis

mewawancarai informan ini untuk mengetahui dampak dari kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan gampong bagi perwakilan masyarakat tersebut.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk menjabarkan penelitian melalui pengamatan, melalui metode ini peneliti mengkaji langsung masalah yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dibahas peneliti. Observasi digunakan untuk mendapat data yang relevan sesuai judul yang terkait melalui survei langsung ke lapangan yaitu di desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif analisis yang terdiri dari empat tahapan²⁵ yaitu :

- 1
1. Pengumpulan data. Mencari, mencatat, mengumpulkan data sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data. Merangkum dan memilah hal-hal pokok atau yang dianggap penting terkait judul yang diteliti dimana akan memberikan gambaran jelas untuk pengumpulan data ke tahap selanjutnya.
3. Penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dan direduksi disajikan dalam bentuk narasi berupa keterlibatan perempuan sebagai kepala lorong

²⁵Matthew B dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007) h.16-19

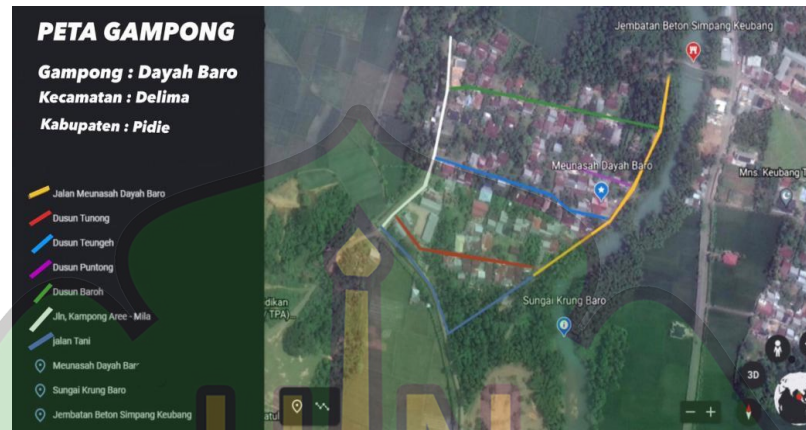
dalam pemerintahan gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten
Pidie

4. Pengambilan keputusan. Pada tahap ini menulis akan menarik kesimpulan yang kemudian diverifikasi dengan mengkaji kembali proses reduksi dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari judul dan masalah peneliti



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Profil Gampong Dayah Baro



Gambar 1. Peta Gampong Dayah Baro

Sebelum berganti nama menjadi Dayah Baro gampong ini memiliki nama yang cukup unik yaitu "Kong-Kong", Gampong ini terletak di Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, secara geografis di $110^{\circ} 48' 55,12''$ BT & terletak di $7^{\circ}02'27,52''$ LS. Gampong Dayah Baro dikelilingi oleh persawahan dari sebelah Timur, Utara, Selatan,serta dari sebelah Barat dilintasi oleh sungai yang menghubungkan antara Gampong Dayah Baro dan Kecamatan Indrajaaya. Mayoritasnya mata pencaharian masyarakat Gampong Dayah Baro adalah petani, masyarakat cukup produktif dalam mengembangkan sektor pertanian seperti padi, bawang, cabe, semangka, dan timun. Dayah Baro termasuk kedalam kategori daerah dataran rendah dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl). Adapun luas wilayah Gampong Dayah Baro adalah 45 Ha yang terdiri dari :

- a. Tanah sawah : 35 Ha
 - Irigasi teknis : 1 Ha

- Irigasi setengah teknis : 1 Ha
 - Tadah hujan : 33 Ha
- b. Tanah bukan sawah : 10 Ha
- Pekarangan/Bangunan : 5 Ha
 - Tegalan : 4 Ha
 - Lain-lain (sungai, jalan, makam) : 1 Ha

Adapun mata pencarian terbesar masyarakat Gampong Dayah Baro adalah petani, dikarenakan letak geografisnya dan luas wilayah yang sangat memungkinkan untuk bidang pertanian. Pertanian yang dimaksud adalah padi, dimana luas persawahan sama besar dengan perkebunan. Setiap sebelah barat dusun berbatasan dengan sungai Baro, sarana dan prasarana juga cukup memadai bagi masyarakat gampong sehingga dengan kata lain masyarakat dimakmurkan dengan luasnya sungai dan tanah yang memadai. Berikut data mata pencaharian penduduk Gampong Dayah Baro :

No	Lapangan usaha	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Pertanian, pemburuan dan kehutanan	201	77,6%
2	Pedagang Barang dan Jasa	42	16,2%
3	Industri Pengolahan	-	0%
4	Listrik, gas, dan air	1	0,4%
5	Bangunan dan konstruksi	3	1,2%
6	Bengkel	2	0,8%

7	Angkutan dan komunikasi	-	0%
8	Lembaga keuangan	-	0%
9	Jasa-jasa lainnya	10	3,9%
	Jumlah	259	100%

Tabel 4. Mata pencaharian Penduduk

Masyarakat di Gampong ini hidup dengan rasa sosial yang tinggi serta damai dan rukun dalam kesehariannya. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah Bahasa Aceh, terkadang menggunakan bahasa Indonesia apabila berinteraksi dengan orang luar. Gampong Dayah Baro dibagi atas 4 Dusun yang merupakan bagian kerja wilayah gampong dan ditetapkan menurut peraturan gampong. Berikut keempat dusun di Gampong Dayah Baro :

- Dusun Baroh
- Dusun Puntong
- Dusun Teungoh
- Dusun Tunong

Dari pembagian keempat dusun diatas tercatat jumlah penduduk yang ada di Gampong Dayah Baro berjumlah 520 jiwa. Penduduk dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 238 jiwa yaitu sekitar 46% dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 282 atau setara dengan 54%. Dusun baroh merupakan dusun yang paling banyak jumlah penduduknya dibandingkan dengan dusun lainnya yang ada di Desa Dayah Baro sedangkan Dusun Puntong menjadi dusundengan

penduduk paling sedikit.. Berikut pendataan jumlah penduduk berdasarkan dusun di Gampong Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie.

NO	Data	Dusun Baroh	Dusun Puntong	Dusun Teungoh	Dusun Tunong
1.	KK Perdusun	52	11	37	40
2.	Pria Perdusun	85	19	71	63
3.	Wanita Perdusun	128	18	61	75
	Jumlah Jiwa	213	37	132	138

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk,2021

Penduduk Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie terus bertambah dari tahun 2019 sebanyak 401 jiwa sampai dengan tahun 2021 menjadi 520 jiwa, kenaikan jumlah penduduk tersebut setara dengan 0,73%. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk di Desa Dayah Baro juga sangat signifikan untuk penduduk berjenis kelamin perempuan, dimana pada tahun 2019-2020 penduduk masih didominasi oleh laki-laki dan pada tahun 2021 penduduk perempuan bertambah lebih besar dari laki-laki. Untuk lebih jelas data penduduk gampong tahun 2019 sampai dengan 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

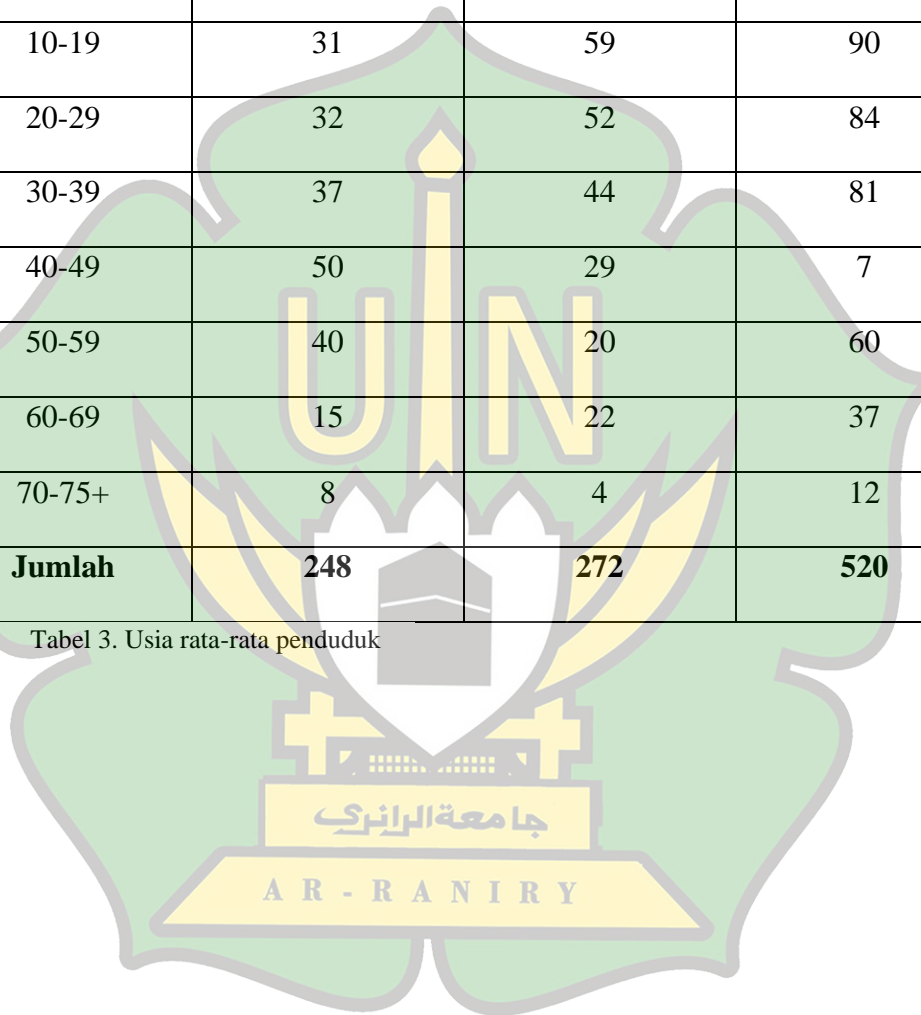
Tahun	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Jumlah
2019	206	195	401
2020	207	196	404
2021	238	282	520

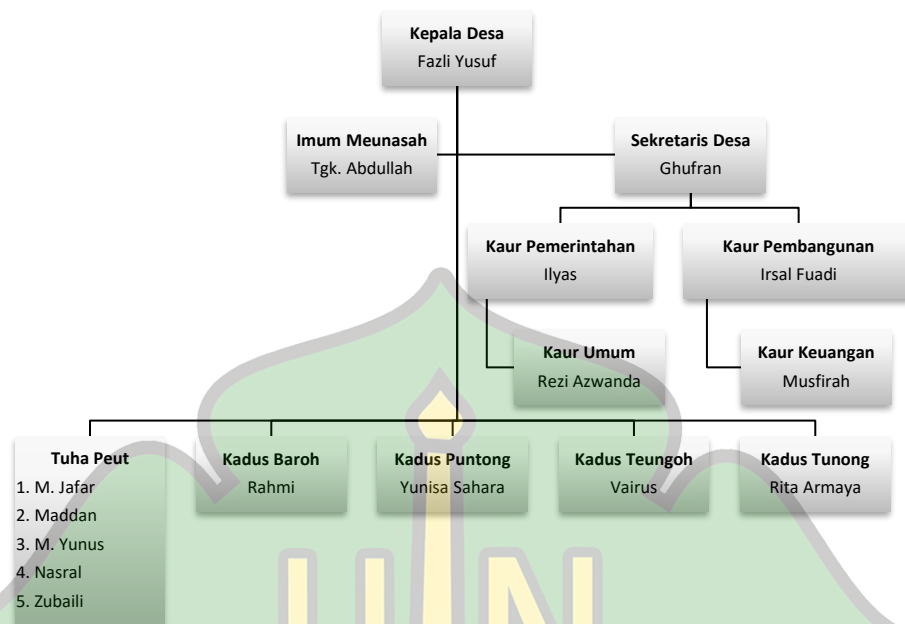
Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Gampong Dayah Baro

Untuk data usia rata-rata penduduk Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-9	35	42	77
10-19	31	59	90
20-29	32	52	84
30-39	37	44	81
40-49	50	29	7
50-59	40	20	60
60-69	15	22	37
70-75+	8	4	12
Jumlah	248	272	520

Tabel 3. Usia rata-rata penduduk





Tabel 5. Struktur Pemerintahan Gampong Dayah Baro

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa di Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie dalam tatanan pemerintahannya melibatkan perempuan sebagai Kepala Dusun. Terdapat empat dusun yang setiap dusun dipimpin oleh perempuan, dimana keempat perwakilan dari perempuan tersebut akan mengatur pemerintahannya di wilayah masing-masing guna membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Di dalam pemerintahan Gampong Dayah Baro terdapat 38% jumlah perempuan atau setara dengan 5 orang dalam 13 jabatan yang ikut berpartisipasi, dibandingkan dengan tiga gampong yang ada di Kecamatan Delima yaitu Gampong Keurumbok yang memiliki 1 perempuan dalam pemerintahan setara dengan 7%, diikuti oleh Gampong Ulee Tutue Raya dengan persentase yang sama. Sedangkan untuk Gampong Puuk tercatat 2 orang perempuan atau setara dengan 15% keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten

Pidie dalam struktur pemerintahannya banyak jabatan yang didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan Desa lain yang ada di Kecamatan Delima Kabupaten Pidie.

4.2 Perempuan dalam pemerintahan desa Dayah Baro

Perempuan merupakan salah satu perbincangan yang menarik untuk dibahas baik oleh perempuan itu sendiri ataupun oleh kalangan laki-laki. Hal ini dikarenakan perempuan sendiri memiliki peranan yang sangat penting sekaligus pendidik dan penerus bagi generasi selanjutnya. Berbicara masalah perempuan, maka kita harus meyakini bahwa pada dasarnya antara perempuan dan laki-laki kedudukan yang mereka miliki itu sama, mereka mempunyai kecerdasan otak yang sama serta sama-sama memiliki impian dan harapan selayaknya manusia pada umumnya. Kepemimpinan perempuan pada era pembangunan baik pada masa sekarang ataupun di masa yang akan datang dapat menciptakan potensi yang besar bagi pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta politik pada tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan penelitian di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie ditemukannya beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan yaitu pendidikan, pertimbangan ekonomi, dan patriarki.

4.2.1 Pendidikan

Partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa faktor tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam proses keikutsertaan masyarakat khususnya perempuan dalam pemerintahan

gampong. Tingkat pendidikan menunjukkan tingkat wawasan dan intelektual yang dimiliki seseorang, sehingga diharapkan memiliki nilai (kapasitas) dalam berkiprah di dunia politik yang dinamis lebih tinggi dari organisasi lainnya. Faktor pendidikan mempunyai peran yang dominan bagi seseorang untuk berkiprah atau berprofesi sebagai pelaku politik khususnya di Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie. Hal ini sesuai berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang kepala dusun yang ada di Gampong Dayah Baro

Kepala Dusun Tunong:

Untuk ikut serta dalam pemerintahan gampong, posisi kepala dusun dipilih langsung oleh kepala desa (Gesyik) dengan kriteria pendidikan yang memadai yaitu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi setelah lulus sekolah menengah atas (SMA), saya sendiri selaku kepala dusun Tunong yang latar belakang pendidikan saya yaitu MIN Kampong Aree kemudian lanjut di MTsN Delima, selanjutnya MAN 1 Sigli dan menempuh pendidikan di level lebih tinggi D-3 Kebidanan serta pendidikan terakhir saya yaitu D-4 Kebidanan.²⁶

Kepala Dusun Teungoh:

Saya selaku kepala dusun Teungoh menempuh pendidikan mulai dari SDN Ulee Tutue Aree yang beralamat di Gampong Dayah Baro, kemudian saya lanjut di SMPN 9 Langsa, selanjutnya SMAN 3 Langsa serta pendidikan terakhir saya yaitu D-3 Universitas Jabal Ghafur Program Studi Informatika.²⁷

Kepala Dusun Puntong:

Pendidikan saya menjadi salah satu patokan yang digunakan kepala desa dalam memilih atau menunjuk saya sebagai kepala dusun. Dusun Puntong berada dibawah kepemimpinan saya dengan latar belakang jenjang pendidikan saya yaitu SDN Ulee Tutue Aree, SMPN 1 Indrajaya, kemudian SMAN 1 Indrajaya, selanjutnya D-2 Al-Hilal Program Studi Pendidikan

²⁶Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

²⁷Wawancara dengan Kepala Dusun Teungoh, pada tanggal 30 Agustus 2022

Guru Madrasah Ibtidaiyah(PGMI) dan terakhir melanjutkan S-1 di Al-Hilal Program Studi Pendidikan Agama Islam. ²⁸

Kepala Dusun Baroh:

*Sebagai kepala dusun Baroh, saya menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD di SDN Ulee Tutue Aree, MTsN Delima, Kemudian SMAN 2 Ingin Jaya Aceh Besar, serta D-3 Akademi Keperawatan Pemda Sigli dan kemudian memperoleh gelar sarjana S-1 di Stikes Bumi Persada Lhokseumawe.*²⁹

Berdasarkan pernyataan para Kepala Dusun diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh perempuan yang menjabat sebagai kepala dusun telah menyelesaikan pendidikan S1 atau setingkatnya dibandingkan dengan perempuan lainnya yang ada di Desa Dayah Baro yang masih terbatas dalam mengenyam pendidikan. Pendidikan menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keikutsertaan atau partisipasi masyarakat terkhususnya perempuan dalam pemerintahan Gampong, serta dapat menjadi tolak ukur bagi kepala desa dalam menentukan layak atau tidaknya keikutsertaan mereka sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Semakin berpendidikannya seseorang maka kapabilitas yang dimiliki semakin tinggi serta menciptakan potensi yang dapat digunakan untuk membangun gampong akan semakin baik pula sejalan dengan pendidikan yang diemban. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa yaitu Fazli Yusuf:

*Saya pilih perempuan sebagai kadus karena memang salah satunya mereka punya gelar S1 dan juga enak diajak diskusi, kalau laki-laki walaupun mereka juga berpendidikan tapi sifat mereka yang maunya menang sendiri jadi susah diajak kompromi.*³⁰

²⁸Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong, pada tanggal 24 Agustus 2022

²⁹Wawancara dengan Kepala Dusun Baroh, pada tanggal 30 Agustus 2022

³⁰Wawancara dengan Kepala Desa, pada tanggal 26 November 2022

Menurut identifikasi Margaret Prameela dalam Jurnal Internasionalnya yang berjudul “Woman Education in India” Pendidikan sangat berpengaruh bagi perempuan yaitu sebagai berikut :

- Pendidikan mampu memberdayakan perempuan secara utuh. Pemberdayaan perempuan ini akan meningkatkan kecerdasan, sikap maupun keterampilan sehingga akumulasi dari dampak positif Pendidikan secara luas akan mampu meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan dan kesejahteraan kehidupan suatu bangsa.
- Prasyarat untuk memasuki dunia pekerjaan dengan beragam profesi adalah Pendidikan. Sehingga perempuan terdidik akan memiliki kesempatan yang luas untuk memilih profesi apa yang akan dia jalankan di kehidupannya.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, di Desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie terkonfirmasi bahwa penemuan sebelumnya yang dilakukan oleh Rajesh Paul dkk tentang Partisipasi Perempuan dalam Perspektif Negara Bangladesh yaitu pendidikan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemerintahan dan pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan, bagi perempuan pendidikan dapat membantu untuk mendapat hak-hak sosial dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan keluarga. Dengan adanya pendidikan maka perempuan bisa menggunakan haknya dalam politik.³¹

³¹*Ibid*, h.9

4.2.2 Kebebasan Ekonomi

Pada zaman sekarang ini, kebutuhan finansial atau kebebasan dalam berekonomi bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga dapat ikut memperbaiki ekonomi keluarga dengan bekerja diruang publik ataupun privat. Bagi yang sudah berkeluarga maka perempuan dapat bekerja untuk kestabilan finansial rumah tangganya, sedangkan yang belum berkeluarga bekerja dilakukan untuk menghasilkan uang bagi kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu partisipasi perempuan dalam pemerintahan juga ikut dikaitkan dengan pengaruh ekonomi, hal ini sesuai dengan wawancara bersama Kepala Dusun Tunong yaitu Ibu Rita Armaya, Kepala Dusun Baroh yaitu Ibu Rahmi, serta Kepala Dusun Teungoh yaitu Ibu Vairus.

Kepala Dusun Tunong :

Tentu saja faktor ekonomi sangat berpengaruh bagi saya untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan gampong, walaupun gajinya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya yang banyak, tapi bisa meringankan sedikit beban suami saya yang pekerjaannya seorang tenaga bakti di rumah sakit umum. Selain itu saya juga bekerja sampingan sebagai tenaga bakti di puskesmas, sehingga keadaan finansial saya bisa ikut stabil jika disatukan dari hasil bekerja dipemerintahan sebagai kadus dan bakti di puskesmas.³²

Kepala Dusun Baroh:

Iya, kebebasan ekonomi menjadi alasan yang saya pertimbangkan untuk mengambil jabatan sebagai kadus, dikarenakan saya juga belum berkeluarga sehingga tidak ada harapan dari orang lain untuk menjalani hidup sehari-hari dan ibu saya yang sudah lanjut usia yang masih harus saya nafkahi. Selain menjadi kadus saya juga tenaga honorer di puskesmas kecamatan dan ikut-ikutan jadi reseller online shop.³³

Kepala Dusun Teungoh:

Menjadi kepala dusun membantu saya dalam hal ekonomi, apalagi suami

³²Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

³³Wawancara dengan Kepala Dusun Baroh, pada tanggal 30 Agustus 2022

saya hanya seorang buruh harian lepas. Selain membantu pemerintahan gampong khususnya didusun tunong agar menjadi gampong yang lebih baik, posisi kadus menjadi hal yang sedikit memudahkan perekonomian saya pada saat ini. Saya juga bakti di puskesmas salah satu Kecamatan di Kabupaten Pidie yang penghasilannya tidak seberapa tapi bisa digabungkan dengan pendapatan menjadi kadus di Gampong Dayah Baro³⁴

4.2.3. Faktor Sosial

Menurut hasil penelitian didapat hasil bahwasanya tidak hanya faktor ekonomi yang menjadi patokan alasan berpartisipasi perempuan dalam pemerintahan, tetapi faktor sosial seperti penyaluran aspirasi masyarakat dan mensejahterakan keluarga menjadi alasan tersendiri, seperti hasil wawancara bersama ibu Yunisa Sahara selaku Kepala Dusun Puntong mengatakan

Kepala Dusun Puntong:

Alasan saya ikut serta dalam pemerintahan Gampong sebagai Kepala Dusun untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat gampong Dayah Baro, khususnya bagi kaum perempuan sehingga penyampainnya lebih mudah melalui saya. Jadi, finansial bukan tolak ukur saya untuk bergabung ke pemerintahan, dan sebelum menjadi kadus sampai dengan sekarang saya juga bekerja sebagai guru di SDN Bluek Glee Cut serta suami saya pegawai kontrak di GraPARI.³⁵

Dari hasil wawancara diatas, terlihat bahwa Kepala Dusun Puntong sudah terbebas secara ekonomi, dimana kadus tersebut tidak menjadikan faktor ekonomi sebagai pertimbangan untuk bergabung dalam pemerintahan tetapi lebih didorong oleh faktor sosial seperti memperjuangkan hak kelompoknya. Untuk Kadus lainnya faktor ekonomi menjadi pertimbangan dalam proses ikut partisipasinya perempuan di Dayah Baro dalam bidang pemerintahan. Dari pernyataan mereka dapat kita lihat bahwa setiap kepala dusun yang menjabat mengemban dua

³⁴Wawancara dengan Kepala Dusun Teungoh, pada tanggal 30 Agustus 2022

³⁵Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong, pada tanggal 24 Agustus 2022

pekerjaan sekaligus, yaitu pekerjaan sebelum menjabat di pemerintahan dan setelah menjabat yaitu kepala dusun. Hal ini juga disebabkan oleh kepedulian mereka daalam mensejahterakan keluarganya sehingga mereka mau menjabat sebagai kepala dusun.

4.2.4 Patriarki

Marginalisasi perempuan terjadi karena adanya stigma-stigma yang melekat pada perempuan seperti yang disebutkan diatas salah satunya adalah kodratnya perempuan adalah dirumah serta adanya belenggu budaya patriarki. Problematika yang menjadikan perempuan termarginalkan adalah adanya stigmasi lain yaitu bahwa perempuan adalah makhluk lemah. Pensifatan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk lemah dan kurang akal menjadikan perempuan terbatas ruang geraknya. Contohnya dalam posisi kepemimpinan laki-laki selalu dianggap lebih baik atau lebih mampu dalam mengelola pemerintahan daripada perempuan begitupun dalam hal pengambilan keputusan, peran perempuan cenderung diabaikan. Faktor kedua dari adanya marginalisasi terhadap perempuan adalah adanya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi kedua yang merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan. Baik dalam hal politik, otoritas moral, hak sosial, maupun penguasaan properti. Oleh karena itu, masih timbul ketimpangan yang nyata dan sangat berimplikasi pada kehidupan masyarakat di era sekarang ini. Norma-norma sosial dalam masyarakat menjadi tolak ukur dalam partisipasi perempuan sehingga mengakibatkan minimnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan,

padahal pada kenyataannya perempuan dapat menyeimbangkan antara tugas pemerintahan dan tugas dalam rumah tangga tanpa membuangkodratnya sebagai seorang perempuan yang bertugas mengurus rumah tangga dengan baik.

Pembahasan tentang budaya patriarki juga ikut disinggung sebagai faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemerintahan, Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Selain itu, produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan tersebut. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisiperempuan menjadi termarginalisasikan.Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.³⁶Adanya budaya patriarki di tengah masyarakat yang memosisikan perempuan sebagai masyarakat kelas dua yang hanya bisa bekerja dirumah dan urusan diluar dilakukan oleh laki-laki serta membuat laki-laki lebih dominan daripada perempuan sehingga perempuan enggan untuk terlibat dalam politik. Menghilangkan budaya patrarki memang sulit tetapi bukan berarti hal tersebut mustahil diterapkan, seperti yang dikemukakan oleh perwakilan perempuan dalam pemerintahan Desa Dayah Baro berikut ini

³⁶Ade Irma Sakina dan Desi Hasanah Siti, 2017,*Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Jurnal Sosial, Volume 7 Nomor 1, h.70

Kepala Dusun Tunong:

*“Patriarki atau anggapan bahwa perempuan adalah dibawah laki-laki merupakan tantangan bagi saya untuk bergerak bebas didalam pemerintahan. Akan tetapi banyak usaha yang telah saya lakukan salah satunya yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengubah mindset mereka bahwa hanya laki-laki saja yang bisa bergabung dalam pemerintahan, dan perempuan bukan berada dibelakang laki-laki tetapi sejajar dengan mereka”.*³⁷

Kepala Dusun Teungoh:

“Upaya yang saya lakukan adalah dengan memberikan bukti konkrit melalui pengetahuan yang saya punya, bahwa saya bisa menyeimbangi laki-laki bahkan melebihi pengetahuan mereka. Dengan pengetahuan yang saya punya maka saya akan membangun Gampong khususnya dusun dibawah pemerintahan saya”.

Kepala Dusun Puntong:³⁸

*“Walaupun sangat sulit menghilangkan budaya patriarki yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat, tetapi hal yang bisa saya lakukan adalah dengan memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mengurangi ekspektasi kepada seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Jangan ada pikiran bahwa laki-laki akan lebih produktif daripada perempuan, melainkan perempuan juga bisa produktif sebagaimana mestinya”.*³⁹

Kepala Dusun Baroh:

*“Ikut sertanya saya dalam pemerintahan merupakan salah satu cara yang sudah saya lakukan untuk memutus rantai budaya patriarki. Perempuan bisa berada dalam ranah pemerintahan untuk mengambil keputusan dan sama-sama bekerja atau berbaur dengan laki-laki”.*⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terlihat jelas bahwa budaya patriarki memang sudah melekat dalam benak masyarakat tanpa terkecuali di Desa Dayah Baro. Tetapi budaya patriarki masih bisa dihilangkan sedikit demi sedikit dengan berbagai upaya yang dapat diusahakan oleh berbagai kalangan masyarakat.

³⁷Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

³⁸Wawancara dengan Kepala Dusun Teungoh, pada tanggal 30 Agustus 2022

³⁹Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong, pada tanggal 24 Agustus 2022

⁴⁰Wawancara dengan Kepala Dusun Baroh, pada tanggal 30 Agustus 2022

Karena dengan terus berkembangnya budaya patriarki ditengah kehidupan masyarakat maka akan munculnya permasalahan sosial.

4.3 Faktor Pendukung Kepemimpinan Perempuan di Desa Dayah Baro

Seiring berkembangnya zaman pada saat ini, banyak perempuan yang mulai terjun ke dunia pemerintahan tidak terkecuali menjadi pemimpin. Tetapi dalam menjalankan hal tersebut tidaklah terbilang selalu mulus, banyak faktor pendukung dan penghambat yang dirasakan oleh perempuan saat seorang perempuan tersebut menjabat sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Ditambah dengan pelabelan (*Stereotype*) dari masyarakat tentang peran ganda perempuan dalam rumah tangga dan anggapan bahwa perempuan hakikatnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Perempuan juga dianggap sebagai sosok yang lemah, tidak memiliki skill dan emosional. Seorang pemimpin perempuan berpotensi mengalami hambatan dalam memimpin yang lebih besar daripada seorang pemimpin laki-laki. Kepemimpinan perempuan dilegitimasi dalam kehidupan sosial hanyalah sebagai pimpinan organisasi atau perkumpulan perempuan lainnya. Perempuan hanya diberi pimpinan subordinat, atau jika memang memimpin karena alasan diturunkan (keturunan) karena tidak adanya anggota laki-laki.

Ada beberapa faktor pendukung dalam kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan, menurut hasil penelitian di Gampong Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie bahwasanya pendidikan adalah faktor utama yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama kepala dusun Tunong yaitu Rita Armaya.

*“Karena saya memiliki gelar sarjana yang artinya saya pernah menuntut ilmu di jenjang kuliah, makanya kepala desa memilih saya sebagai salah satu calon kadus di Gampong ini. Pendidilkan adalah tolak ukur yang penting dalam memimpin”.*⁴¹

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat bahwa pendidikan yang memadai sangat mendukung kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Dengan adanya pendidikan maka seseorang bisa menjalankan tugasnya dengan mudah dikarenakan ilmu yang sudah dia dapatkan, sehingga permasalahan dalam dusun bisa diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara salah satu perwakilan masyarakat dari golongan yang tidak bekerja dipemerintahan yaitu sbb:

Masyarakat (Yenni Reviana):

*Selama dusun dipegang oleh Rita, saya merasa banyak perubahan yang terjadi, permasalahan didusun bisa diatasi dengan mudah apalagi dia anaknya memang pintar dan punya tittle sarjana.*⁴²

Selain itu motivasi atau dorongan dari keluarga merupakan hal yang dapat mendukung kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepala dusun Puntong yaitu Yunisa Sahara.

*“Waktu saya dipilih sebagai calon kadus saya pertama menolak karena saya rasa hanya menambah beban dalam kehidupan saya, dikarenakan saya juga sudah berumah tangga. Tapi akhirnya suami saya menyarankan untuk terima jabatan tersebut dan dijadikan sebagai salah satu pengalaman dan kesempatan untuk mensejahterakan Gampong”.*⁴³

⁴¹Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

⁴²Wawancara dengan masyarakat perwakilan yang tidak bekerja di pemerintahan, pada tanggal 24 Agustus 2022

⁴³Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong, pada tanggal 24 Agustus 2022

4.4 Faktor Penghambat (Tantangan) Kepemimpinan Perempuan di Desa Dayah Baro

Menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, apalagi kepemimpinan tersebut dipegang oleh perempuan yang keberadaannya kurang diterima oleh masyarakat dikarenakan berbagai faktor yang ada. Banyak hambatan yang harus dilalui oleh seorang pemimpin perempuan, salah satunya yaitu faktor agama dimana setinggi apapun pendidikan dan skill yang dimiliki tetapi dalam agama imam tetaplah seorang laki-laki. Sehingga timbullah pelabelan (*stereotype*) dari masyarakat bahwasanya perempuan tidak memiliki ruang gerak untuk muncul ke publik dan hanya bertempat di rumah saja untuk menjalankan kodrat yang sudah melekat dalam dirinya, hal ini sejalan dengan hasil wawancara berikut:

Kepala Dusun Tunong:

“Kebanyakan masyarakat tidak suka saya jadi kadus, mereka menganggap kalau perempuan itu kerjanya mengurus anak bukan malah memimpin satu dusun di desa. Masih banyak laki-laki yang bisa ambil jabatan itu, kecuali desa ini udah gaada laki-lakinya lagi.”⁴⁴

Kepala Dusun Puntong:

“Sebagian dari masyarakat Desa Dayah Baro masih menganggap bahwasanya perempuan tidak berhak dalam pemerintahan, dikarenakan dalam pemikiran masyarakat nilai-nilai agama mengedepankan bahwa perempuan hanya bertugas di rumah untuk mengurus rumah tangga. Hanya sedikit dari masyarakat yang pro terhadap kepemimpinan saya dalam pemerintahan sebagai kadus. Tetapi, saya mencoba memberikan bukti melalui hasil kinerja saya untuk memprioritaskan pekerjaan di dalam pemerintahan kemudian menyelesaikan urusan rumah tangga dengan

⁴⁴Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong, pada tanggal 24 Agustus 2022

harapan saya agar bisa memuaskan mereka dengan hasil kepemimpinan saya.”.

Kepala Dusun Tunong:

*“Pastinya para masyarakat menganggap bahwa pemerintahan dibawah pimpinan saya bukanlah hal yang tepat sasaran, mereka menganggap laki-laki masih lebih layak dalam hal ini yaitu laki-laki adalah pemimpin dari perempuan. Namun, saya merealisasikannya dengan memberikan kontribusi nyata kepada Gampong, walaupun tugas utama saya adalah mengurus rumah tangga tapi saya bisa menstabilkan kedua tugas saya baik dalam pemerintahan maupun di rumah. Setiap tugas dalam pemerintahan saya selesaikan dengan sebaik mungkin dan kemudian diikuti dengan tugas rumah tangga saya”.*⁴⁵

Kepala Dusun Baroh:

*“Iya, agama sedikit membatasi ruang gerak saya dikarenakan pemikiran masyarakat yang belum berkembang. Saya mengatasinya dengan memberikan pemahaman kepada mereka atas pentingnya partisipasi perempuan dalam pemerintahan, bahwa perempuan juga bisa ikut dalam kegiatan politik dan mengambil keputusan. Karena saya belum menikah maka urusan rumah tangga tidak menjadi penghalang bagi saya untuk berperan sebagai kepala dusun”.*⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas terlihat jelas bahwa masyarakat Desa Dayah Baro masih menganggap perempuan tidak bisa memimpin, mereka merujuk pada agama yang menyatakan bahwa pemimpin dari pada wanita adalah laki-laki. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama perwakilan masyarakat yang bekerja dalam pemerintahan (Tuha Peut) yaitu sebagai berikut.

Masyarakat (YunusIdris)

“Saya kurang setuju tentang keputusan kepala desa menunjuk perempuan sebagai kepala dusun di Gampong ini, menurut saya perempuan itu pada dasarnya mengurus rumah tangga. Perempuan juga pasti kesulitan dalam

⁴⁵Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada Tanggal 26 Agustus 2022

⁴⁶Wawancara dengan Kepala Dusun Baroh, pada tanggal 30 Agustus 2022

menyeimbangkan kegiatan rumah tangga dan kegiatan di pemerintahan. Dalam agama juga sudah dijelaskan bahwasanya laki-laki adalah pemimpin dari perempuan.”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat bagi perempuan dalam kepemimpinannya di Dayah Baro ialah berangkat dari proses marginalisasi perempuan yang sudah mendapatkan pelabelan (*stereotype*) dari masyarakat bahwasanya perempuan tidak memiliki ruang gerak untuk muncul ke publik dan hanya bertempat di rumah saja untuk menjalankan kodrat yang sudah melekat dalam dirinya, sehingga peran perempuan dalam ruang publik terus dipermasalahkan dikarenakan stigma-stigma yang dibangun dalam masyarakat.

4.5 Upaya Perempuan Menghadapi Tantangan dalam Kepemimpinannya di Desa Dayah Baro

Dalam kepemimpinannya dipemerintahan perempuan cenderung mendapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan dan diatasi dengan baik agar tugas yang telah diberikan dapat dipertanggung jawabkan sebagai mana semestinya. Para perempuan yang menjabat sebagai Kadus di Desa Dayah Baro berupaya dengan sangat gigih mengusahakan dengan sebaik mungkin segala tugas yang telah di embani oleh kepala desa kepada para kepala dusun perempuan di Desa Dayah Baro. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara berikut ini:

Kepala Dusun Tunong (Rita Armaya)

Kadang-kadang tenggat waktu antara tugas pemerintahan juga sekalian sama laporan saya di rumah sakit. Jadinya saya harus kerja ekstra untuk

⁴⁷Wawancara dengan masyarakat perwakilan yang bekerja dipemerintahan, pada tanggal 24 Agustus 2022

*menyelesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan salah satunya.*⁴⁸

Kepala Dusun Puntong (Yunisa Sahara)

*Pernah waktu itu saya harus isi nilai anak-anak karena mau pembagian rapor, tetapi ternyata kebetulan harus data jumlah penduduk di dusun puntong kembali karena disuruh sama kepala desa.*⁴⁹

Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya pembagian waktu menjadi beban tersendiri bagi kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan. Dikarenakan pekerjaan utama dan tanggungjawab sebagai pemimpin harus bisa mereka selaraskan agar terlaksana sesuai dengan semestinya. Tetapi para perempuan yang memimpin tetap menjalankan dan mengupayakan hasil yang sebaik-baiknya bagi kemajuan Gampong untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mengedepankan profesionalitas dengan menyeimbangkan antara rumah tangga dan pemerintahan, serta membendung budaya patriarki dengan melakukan sosialisasi dan terus berpartisipasi dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama kepala dusun Tunong berikut ini:

*“Tentu saja hal itu sedikit menyulitkan saya dalam menjalankan tugas saya sebagai kepala dusun. Apalagi para kaum laki-laki yang memang sangat kontra terhadap kepemimpinan saya. Mereka menganggap bahwa laki-laki yang lebih pantas untuk ikut andil dalam pemerintahan dan bukan perempuan. Untuk masalah menyeimbangkan antara rumah tangga dan urusan dalam pemerintahan, saya mengutamakan dulu urusan pemerintahan apabila urusan rumah tangga saya masih bisa dinomorduakan atau belum dalam keadaan darurat (urgent). Jadi, profesionalitas sangat saya junjung tinggi.”*⁵⁰

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perempuan memiliki sikap optimisme serta tekad yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan dan

⁴⁸Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

⁴⁹Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong, pada tanggal 24 Agustus 2022

⁵⁰Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

sigma-sigma yang memomordukan perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga berhak dan layak memiliki peran yang sama dengan laki-laki di dalam ruang publik

4.6 Dampak Kepemimpinan Perempuan di Desa Dayah Baro

Kepemimpinan adalah sifat menerapkan pengaruh kepada seseorang atau lebih dan kelompok atau organisasi terhadap anggota lainnya guna mendorong kelompok atau organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat serta pembangunan adalah sebagai fondasi yang berstruktur kuat, seperti perjuangan sosok R.A. Kartini dapat dirasakan dengan adanya pergerakan emansipasi wanita. Keberadaan peran wanita sebagai pimpinan saat ini mulai diakui sejalandenggerakan emansipasi dan gerakan kesetaraan gender yang pada dasarnya berusaha menuntut adanya persamaan hak wanita dalam berbagai aspek kehidupan, wanita mempunyai kemampuan yang sama untuk berada di posisi puncak dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Perempuan adalah makhluk yang mampu dan bisa mengerjakan banyak hal (*multitasking*) serta seluruhnya bisa dilakukan dengan konsentrasi yang sama.⁵¹ Perempuan juga menginginkan semua bisa cepat terselesaikan dengan baik serta memahami masalah mana yang lebih prioritas agar solusi makin cepat muncul. Menurut hasil penelitian yang telah penulis lakukan di desa Dayah Baro Kecamatan Delima Kabupaten Pidie terdapat beberapa hal berbeda dari dampak kepemimpinan perempuan yaitu agenda yang berbeda, gaya

⁵¹Ayu Fitriana, 2021, *Perempuan dan Kepemimpinan*, Prosiding Webinar Nasional Palangkaraya, Nomor 1

kepemimpinan yang berbeda serta meningkatnya jumlah partisipasi perempuan lain akibat dari adanya kepemimpinan perempuan.

4.6.1 Agenda yang Berbeda

Salah satu dampak dari adanya kepemimpinan perempuan didalam pemerintahan yaitu perbedaan agenda kepemimpinan antara perempuan dengan laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan para responden berikut ini.

Kepala Dusun Baroh:

*“Salah satu perbedaan antara saya dan pemimpin sebelumnya selama menjadi kadus adalah tentang mengajukan saran atau menyampaikan aspirasi kepada kepala desa untuk mengambil kebijakan yang pro perempuan, hal ini saya lakukan untuk memberdayakan perempuan didesa saya”.*⁵²

Kepala Dusun Puntong:

“Saya berusaha menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di Desa Dayah Baro dengan ikut melibatkan perempuan lain jika ada kegiatan-kegiatan di Desa. Sehingga adanya variasi suara dalam proses berjalannya pemerintahan”.

Kepala Dusun Teungoh:

*“Tentu saja agenda yang saya tawarkan untuk dikaji kembali oleh kepala desa mengenai isu perempuan dan risu sosial yang berdampak bagi masyarakat. Contohnya adalah posyandu lansia yang saya sarankan untuk dibuat bukan hanya posyandu balita saja”.*⁵³

Kepala Dusun Tunong:

“Saya lebih menyarankan ke masalah pelestarian budaya, dan lagi-lagi tentu saja yang melibatkan perempuan. Jadi selama ini didesa saya tidak ada acara teot apam (serabi) massal, saya lihat didesa lain semuanya ada. Maka dari itu saya mencoba menyarankan kepada kepala desa dan

⁵²Wawancara dengan Kepala Dusun Baroh, pada tanggal 30 Agustus 2022

⁵³Wawancara dengan Kepala Dusun Teungoh, pada tanggal 30 Agustus 2022

*akhirnya direalisasikan pada tahun ketiga saya menjabat”.*⁵⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya perempuan dalam pemerintahan maka akan menghasilkan agenda yang berbeda dalam proses kepemimpinannya, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cenderung responsif dan ramah perempuan. Perempuan berfokus kuat pada isu-isu perempuan dan hak asasi manusia yang dapat meminimalisir diskriminasi terhadap perempuan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pekerjaan serta pengasuhan anak. Perempuan dalam kepentingannya juga berfokus pada lingkungan, budaya, pengasuhan anak, dan pendidikan. Hal ini menghasilkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam terealisasinya program-program gampong dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama bagi kemajuan gampong.

4.6.2 Gaya Kepemimpinan yang Berbeda

Selain agendanya yang berbeda, gaya kepemimpinan antara laki-laki dan perempuan juga memiliki perbedaan dalam prakteknya. Perempuan cenderung lebih demokratis yaitu mengambil jalan diskusi atau musyawarah dalam mengambil sebuah kebijakan atau memutuskan suatu hal. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala dusun di Desa Dayah Baro berikut ini.

Kepala Dusun Tunong (Rita Armaya)

“Saya lebih memilih berdiskusi daripada memerintah dalam struktur pemerintahan. Misalnya apabila ada permasalahan, saya meminta saran dan masukan secara bebas yang kemudian saya pertimbangkan sebelum

⁵⁴Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

*mengambil keputusan”.*⁵⁵

Kepala Dusun Puntong (Yunisa Sahara)

*“Kalau untuk saya sendiri pastinya dalam menjadi bagian pemerintahan gampong, saya sangat menekankan untuk menurunkan ego saya dengan menerima segala kritikan dan membuktikannya dengan pencapaian”.*⁵⁶

Secara umum, ada dua tipe gaya kepemimpinan yang khas pada perempuan, yaitu kepemimpinan feminim-maskulin, dan kepemimpinan transformasional-transaksional. Menurut penelitian oleh Loden pada tahun 1985, kepemimpinan maskulin cenderung lebih kompetitif dan memiliki kontrol tinggi bagi pemimpin serta tidak emosional dalam mengatasi masalah yang sedang terjadi. Sedangkan kepemimpinan feminim memiliki ciri khusus yaitu kooperatif dan melakukan kolaborasi dengan bawahan dan atasan serta kontrol yang rendah bagi pemimpin dalam mengatasi masalah memakai intuisi dan rasa empati.⁵⁷ Kemudian Bass juga meneliti tentang gaya kepemimpinan pada tahun 1985, menurut Bass kepemimpinan transaksional cenderung melakukan pendekatan sosial dengan melibatkan proses timbal balik antara atasan dan bawahan. Sedangkan kepemimpinan transformasional menjelaskan bahwa pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk membawa para bawahan mencapai kepentingannya tanpa mementingkan self interest mereka sendiri.⁵⁸ Tetapi pada kenyataannya bisa saja gaya kepemimpinan perempuan terkombinasi antara kedua gaya di atas tergantung karakteristik dan tuntutan pekerjaannya.

⁵⁵Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong, pada tanggal 26 Agustus 2022

⁵⁶Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong, pada tanggal 24 Agustus 2022

⁵⁷Nina Zulida Situmorang, 2011, *Gaya Kepemimpinan Perempuan*, Jurnal Volume 4, h.132

⁵⁸*Ibid*, h.133

4.6.3 Peningkatan Jumlah Partisipasi Perempuan

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan juga dapat meningkatkan jumlah partisipasi perempuan lainnya baik individu maupun komunitas. Hal ini disebabkan karena adanya perwakilan perempuan dalam pemerintahan sehingga timbul minat para perempuan lain untuk ikut serta didalamnya. Dengan adanya perempuan dalam pemerintahan maka dapat dijadikan dukungan bagi perempuan lain, atau dalam bahasa sekarang ini sering disebut dengan istilah “*women support women*”. Perempuan secara aktif meningkatkan partisipasi perempuan untuk memastikan bahwa isu-isu perempuan dapat menjadi agenda yang terealisasi, serta perempuan ikut terlibat dalam merekrut lebih banyak perempuan di berbagai program yang dijalankan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dusun perempuan Desa Dayah Baro terkait hal ini.

Kepala Dusun Teungoh (Vairus):

*“Partisipasi perempuan di Desa Dayah Baro sangat baik, hal ini dikarenakan mereka lebih leluasa dalam bergerak melakukan kegiatan sebab saya selaku kadusnya adalah perempuan juga. Jadi apabila ada permasalahan yang ingin didiskusikan mereka dengan leluasa berbicara langsung kepada saya. Saya juga terus memberikan dukungan kepada mereka untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan gampong tanpa harus merasa terpinggirkan”.*⁵⁹

Kepala Dusun Baroh (Rahmi):

“Semenjak dusun dipegang kepemimpinannya oleh saya, antusias masyarakat khususnya kaum perempuan sangatlah bagus. Mereka mulai menyampaikan aspirasinya melalui saya yang kemudian saya bahas bersama pejabat pemerintahan Gampong lainnya. Saya juga terus mendorong mereka agar mereka tahu bahwa perempuan dan laki-laki bisa bekerja beriringan didalam pemerintahan. Dengan adanya saya dan perempuan lainnya dipemerintahan, mereka juga berminat untuk ikut

⁵⁹Wawancara dengan Kepala Dusun Teungoh, pada tanggal 30 Agustus 2022

*berpartisipasi dalam pemerintahan”.*⁶⁰

Dari pernyataan diatas benar adanya bahwa partisipasi perempuan dapat menarik minat atau meningkatkan antusias perempuan lainnya dalam pemerintahan serta kegiatan-kegiatan didusun. Hal ini sesuai dengan dampak yang dirasakan oleh perwakilan masyarakat dari golongan ibu-ibu di Desa Dayah Baro yaitu sbb:

Masyarakat (Rohani)

*“Saya sebagai perempuan mendapat pemimpin perempuan sangat merasa cocok dan terbantu selama kepemimpinannya pun membawa hal yang positif. Kalau mau bilang sesuatu itu enak penyampaiannya karena sama sama perempuan, sehingga masalahnya langsung bisa terselesaikan”.*⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan dapat membantu meningkatkan partisipasi perempuan dalam ruang publik serta perempuan dapat lebih berani menyampaikan aspirasinya.

⁶⁰Wawancara dengan Kepala Dusun Baroh, pada tanggal 30 Agustus 2022

⁶¹Wawancara dengan masyarakat perwakilan ibu-ibu, pada tanggal 26 Agustus 2022

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

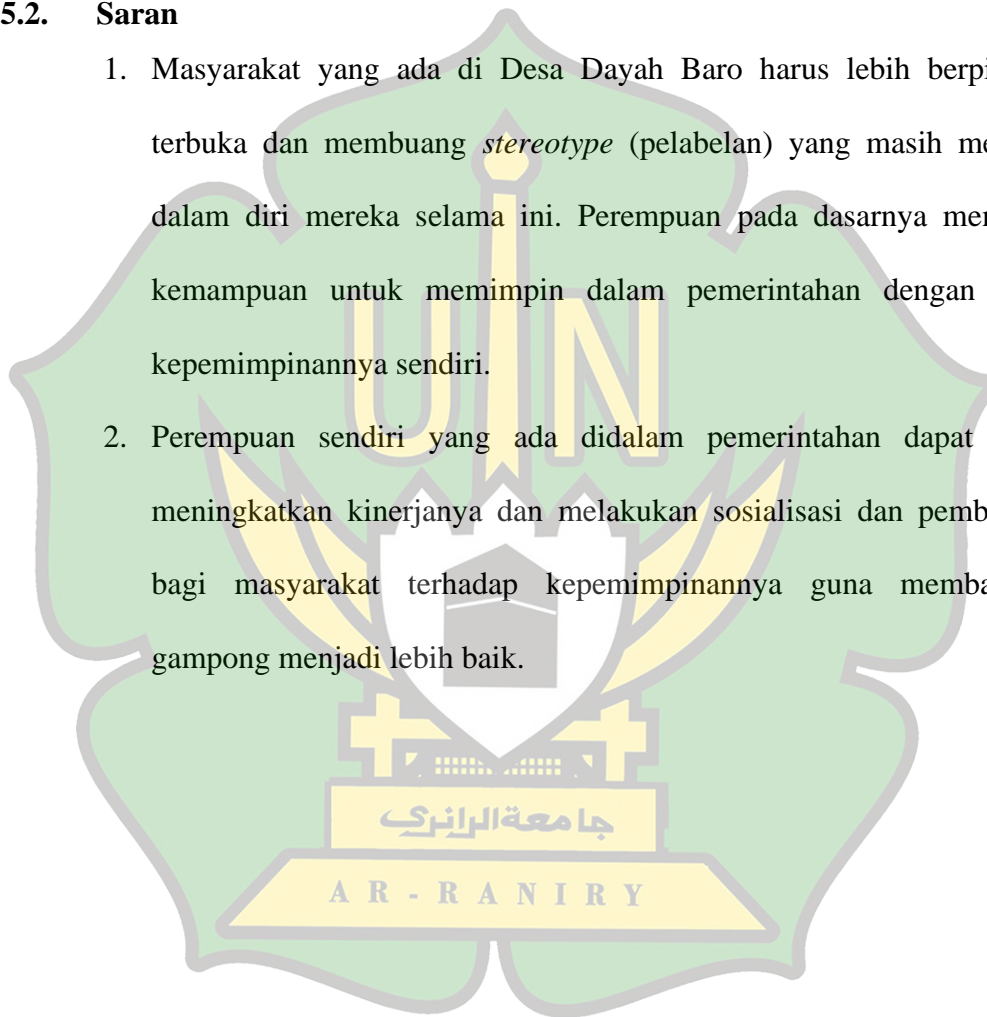
Berdasarkan pembahasan dan analisa data dalam penelitian mengenai Peran Perempuan Sebagai Kepala Dusun Dalam Pemerintahan Gampongdi Desa Dayah Baro maka dapat disimpulkan:

1. Partisipasi atau keterlibatan perempuan dalam pemerintahan Gampong Dayah Baro dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, dengan adanya pendidikan yang memadai maka semakin besar pula kesempatan untuk bergabung dalam pemerintahan. kemudian faktor kebebasan ekonomi, dimana perempuan memiliki kebebasan dalam mencukupi kehidupan finansialnya dengan ikut bergabung dalam pemerintahan. Faktor sosial berpengaruh dalam keterlibatan perempuan dikarenakan keinginannya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan faktor patriarki, dimana anggapan bahwa kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki.
2. Dampak dari kepemimpinan perempuan yaitu agenda yang berbeda, gaya kepemimpinan yang berbeda serta meningkatnya jumlah partisipasi perempuan lain akibat dari adanya kepemimpinan perempuan.
3. Faktor penghambat bagi perempuan dalam kepemimpinannya di Dayah Baro ialah berangkat dari proses marginalisasi perempuan yang sudah mendapatkan pelabelan (*stereotype*) dari masyarakat bahwasanya perempuan tidak memiliki ruang gerak untuk muncul ke publik dan

hanya bertempat di rumah saja untuk menjalankan kodrat yang sudah melekat dalam dirinya. Faktor pendukung bagi perempuan dalam menjalankan kepemimpinannya yaitu adanya motivasi dari keluarga serta pendidikan yang memadai.

5.2. Saran

1. Masyarakat yang ada di Desa Dayah Baro harus lebih berpikiran terbuka dan membuang *stereotype* (pelabelan) yang masih melekat dalam diri mereka selama ini. Perempuan pada dasarnya memiliki kemampuan untuk memimpin dalam pemerintahan dengan gaya kepemimpinannya sendiri.
2. Perempuan sendiri yang ada didalam pemerintahan dapat terus meningkatkan kinerjanya dan melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat terhadap kepemimpinannya guna membangun gampong menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fatoni, 2006, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:RinekaCipta), 96
- Darwin, 2005, *Negara dan Perempuan*, (Yogyakarta:Media Wacana)
- Fakih Mansour, 1997, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar),62
- James M.Henslin, 2006, *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*, (Jakarta:Gelora Aksara Pratama), 4
- Husein Muhammad, 2015, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta:Diva Press), 56
- Imam Gunawan, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktik* (akarta: Bumi Aksara
- Matthew B dan A Michael Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press,), 16-19
- MohKasiram, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta : Sukses Offset),175
- Rostyaningsih, 2010, *Konsep Gender*, (Semarang LPPM UNDIP)
- SumardiSuryabrata, 2012, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: RajawaliPers), 39
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, 2004, (Jakarta:Sinar Grafika)

Jurnal, Skripsi, dan Tesis

Ade Muslimat, 2016, *Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik*, Jurnal Studi Gender dan Anak, 3(2), 24

Cut Laely dkk, 2020, *Peran Perempuan dalam Struktur Pemerintahan Gampong (Studi Gampong Blang Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara)*, Jurnal Sosiologi

Ade Irma Sakina dan Desi Hasanah Siti, 2017, *Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia*, Jurnal Sosial, 7(1), 70

Irsyad Jomisra, 2022, *Keterwakilan Perempuan Dalam Legislatif Terkait Budaya Patriarki Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten LimaPuluh Kota Provinsi Sumatera Barat*, 8

Mahmudi, 2011, *Peran Ganda Perempuan dalam Pembangunan Desa*, Skripsi, 72

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2018, *Ketidakadilan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2(4), 4

Munawiah dan Kamaliah, 2017, *Partisipasi Perempuan Sebagai Anggota Tuha Peut Gampong dan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Meureudu*, Jurnal Pendidikan, 7-9

Novita Sari, 2020, *Affirmative Action di Aceh:Kendala dan Upaya Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan*, Jurnal Pendidikan, 4

Rabiul Tsani, 2021, *Peran Tuha Peut Gampong Perempuan dalam Qanun Kota Langsa (Studi Kasus Gampong Blang Kec. Kota Langsa)*, Jurnal of Gender, 64

Rajesh Paul, Bobita Mohajan, Mohammed Mahin Uddin, MD Amjad Hossain
Reyad, 2019, *Factors Affecting Women Participation in Local
Government Institution: A Case Study of Bangladesh Perspective*),
Journal of Global Research in Education and Social Science, 99-100

Yuli Susanti, 2013, *Analisis Ketidakterlibatan Perempuan dalam Struktur
Pemerintahan Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten
Aceh Barat*, Skripsi, 10-13

Regulasi

Keppres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Gender

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Pasal 27 dan 28 Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan
diskriminasi terhadap perempuan

Undang Undang Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Ratifikasi Konvensi
Hak Perempuan

Website

Gita Rama Mahardika, <https://www.its.ac.id/news/2020/04/22/belunggu-budaya-patriarki-terhadap-kesetaraan-gender-di-indonesia/>, diakses 28 September 2022

<https://www.perlego.com/knowledge/study-guide/what-is-judith-butler-theory-of-gender-performativity/>, diakses 22 Desember 2022

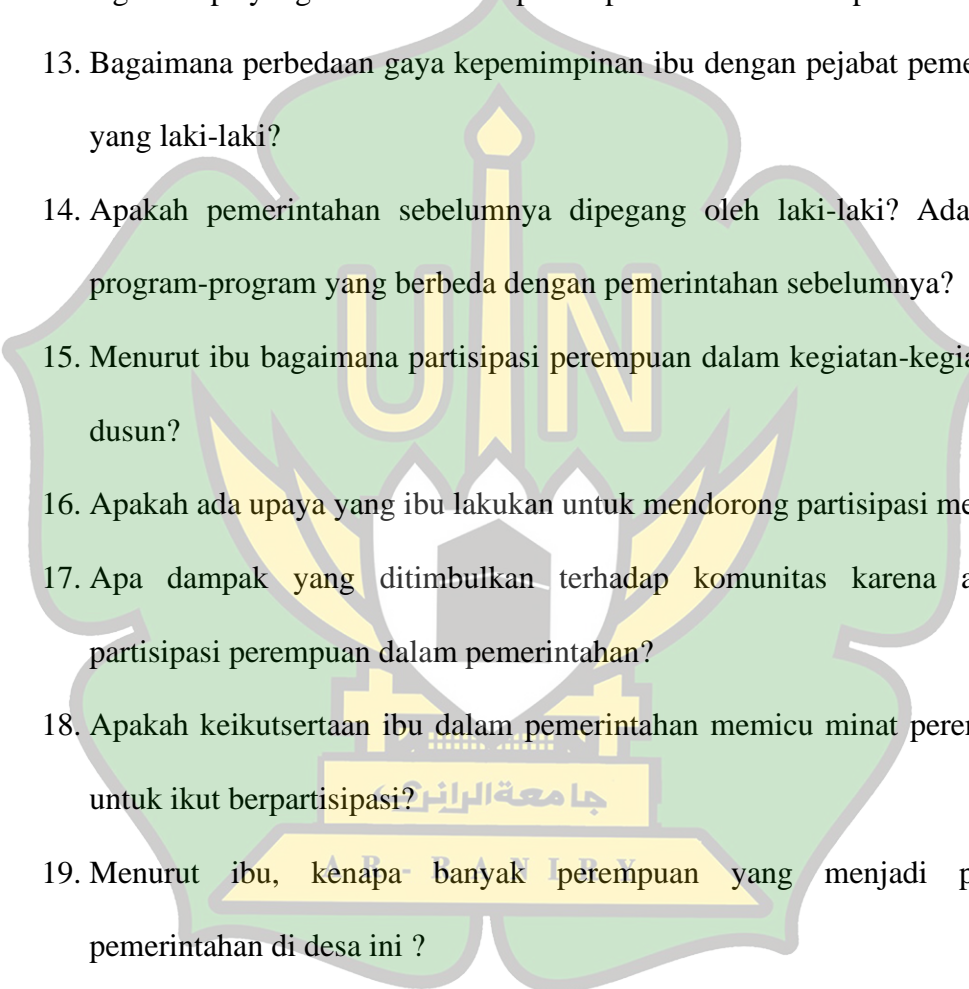
Lampiran 1

INSTRUMEN PENELITIAN “PERAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA DUSUN DALAM PEMERINTAHAN GAMPONG”

(Pendidikan, kebebasan ekonomi, nilai-nilai agama, norma-norma sosial, dan patriarki).

(Agenda yang berbeda, gaya kepemimpinan yang berbeda, peningkatan jumlah partisipasi perempuan, dampak terhadap komunitas, dukungan terhadap perempuan)

1. Apa alasan ibu ikut berpartisipasi dalam pemerintahan ?
2. Bagaimana latar belakang jenjang pendidikan ibu selaku keterwakilan perempuan dalam pemerintahan?
3. Sebelum menjadi kadus, apakah ibu bekerja? (jika tidak, pendapatan rumah tangga dari mana?)
4. Sekarang, selain menjadi kadus, apakah ibu punya pekerjaan lain?
5. Apakah suami ibu bekerja? Sebagai apa?
6. Apakah pendapatan ekonomi mempengaruhi ibu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan ?
7. Apakah nilai agama membatasi ruang gerak ibu dalam pemerintahan? Kalau iya, bagaimana ibu mengatasinya?
8. Bagaimana ibu menyeimbangkan antara rumah tangga dan urusan dalam pemerintahan?
9. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap posisi ibu sebagai perempuan namun bekerja di pemerintahan?

10. Apakah posisi ibu sebagai perempuan menghambat ibu dalam bekerja sebagai pejabat pemerintahan? Jika iya, bagaimana ibu mengatasinya?
11. Upaya apa yang sudah ibu lakukan untuk menghilangkan sistem patriarki dalam pemerintahan?
12. Agenda apa yang berbeda dari kepemimpinan ibu di dalam pemerintahan ?
13. Bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan ibu dengan pejabat pemerintah yang laki-laki?
14. Apakah pemerintahan sebelumnya dipegang oleh laki-laki? Ada tidak program-program yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya?
15. Menurut ibu bagaimana partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan di dusun?
16. Apakah ada upaya yang ibu lakukan untuk mendorong partisipasi mereka?
17. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap komunitas karena adanya partisipasi perempuan dalam pemerintahan?
18. Apakah keikutsertaan ibu dalam pemerintahan memicu minat perempuan untuk ikut berpartisipasi? 
19. Menurut ibu, kenapa banyak perempuan yang menjadi pejabat pemerintahan di desa ini ?
20. Apa faktor pendukung yang mempengaruhi performa ibu dalam pemerintahan?
21. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi performa ibu dalam pemerintahan?

Lampiran 2

DATA PRIBADI

Nama : Arifa Makfirah
Tempat, Tanggal Lahir : Dayah Baro, 15 Desember 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Dayah Baro, Kecamatan Delima, Kabupaten Pidie
No Hp : 085262094160
Email : arifamagfirah@gmail.com

PENDIDIKAN

SD Negeri Ulee Tutue Aree	2006 – 2012
MTsN 1 SIGLI	2012 – 2015
SMAN 1 SIGLI	2015 – 2018
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	2018 – 2022

ORGANISASI

Anggota Himpunan Mahasiswa Politik	2019-2020
Sekretaris Bidang Advokasi dan Propaganda Himpunan	2020-2021
Mahasiswa Ilmu Politik	

PENGALAMAN

Magang KPM	: Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie : Gampong Jurong Mesjid Kec, Kembang Tanjong, Kab. Pidie
------------	---

MOTTO HIDUP

“ Jika orang lain bisa, saya juga bisa”.

LAMPIRAN 3

Dokumentasi dengan Narasumber

Wawancara dengan Kepala Dusun Puntong



Wawancara dengan Kepala Dusun Baroh



Wawancara dengan Kepala Dusun Teungoh



Wawancara dengan Kepala Dusun Tunong



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan masyarakat



